



Realisasi PBB Masih Rendah

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta telah memberikan kebijakan untuk menghapuskan denda Pajak Bumi Bangunan (PBB) bagi wajib pajak yang membayar PBB pada Agustus ini. Namun hingga Selasa (13/8) sekitar pukul 12.00, jumlah pembayaran PBB tercatat Rp800 juta dari 2.785 wajib pajak. Jumlah tersebut jauh dari total tunggakan pokok PBB sebesar Rp75 miliar.

"Paling banyak nilai tunggakan yang 2018 sudah terealisasi Rp229 juta. Ada yang tahun 1994 terealisasi Rp4 juta," ujar Kepala Bidang Pembukuan dan Pengalihan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Santosa, Selasa (13/8).

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan sosialisasi, baik melalui media massa,

kelurahan, kecamatan, dan juga melibatkan pihak bank yang ditunjuk. "Kita mengundang bank tempat pembayaran untuk sosialisasi ke nasabah, termasuk mengirim pesan singkat broadcast dari bank ke nasabah untuk pembayaran PBB ini," jelasnya.

Santoso menjelaskan, bila wajib pajak tidak mengetahui jumlah tunggakan, maka wajib pajak bisa mencari informasi melalui nomor objek pajak (NOP) melalui kelurahan maupun melalui Jogja Smart Service.

"Kalau ada kesulitan mencari tunggakan, bisa datang ke kelurahan, kecamatan, dan loket pembayaran PBB atau di JSS. Ada informasi PBB tinggal masukkan NOP maka muncul tunggakannya. Kalau NOP hilang, datang ke Dinzin (Dinas Penanaman modal dan Per-

izinan), nanti kita carikan alamatnya terus ketemu NOP-nya," ucap Santoso.

Sebelumnya, Kepala BPKAD Kota Yogyakarta Wasesa menjelaskan bahwa wajib pajak bisa mendatangi bank yang ditunjuk untuk membayar PBB, yakni hanya pajak pokok dan tidak perlu membayar denda yang ada.

"Bebas denda ini berlaku untuk PBB tahun 1994-2018. Hanya berlaku satu bulan yang nantinya akan ada Perwal (Peraturan Walikota Yogyakarta)," ujarnya.

Saat ini, jelasnya terdapat 282.976 wajib pajak dengan nilai denda sejak 2011 mencapai Rp27 miliar dan tunggakan pokok PBB sebanyak Rp75 miliar. Harapannya dengan dihapuskan denda tersebut, pada Agustus ini PBB yang dibayarkan sebesar Rp75 miliar tersebut. **(kur)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 14 Januari 2025
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005